

ABSTRAK

Negara dalam rangka pemenuhan kebutuhannya memerlukan kerjasama dengan negara lain, salah satunya ialah demi melindungi kepentingan hukum nasional negara tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin maju memiliki tidak hanya dampak positif, namun memiliki dampak negatif juga, ialah salah satunya perkembangan kejahatan – kejahatan yang semakin sulit untuk ditanggulangi oleh hukum. Salah satu dari kejahatan tersebut ialah kejahatan lintas batas teritori negara yang mana sulit dijangkau dengan hukum nasional. Pemikiran tersebutlah melahirkan konsep praktik ekstradisi dalam Hukum Internasional, ialah demi menangani kejahatan – kejahatan lintas batas territory negara. Permasalahan dalam penulisan hukum ini ialah mengenai keabsahan permintaan ekstradisi Pemerintah Venezuela kepada Amerika Serikat terkait keterlibatan warga negara Amerika Serikat dalam serangan yang terjadi di Venezuela.

Dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder melalui bahan- bahan pustaka. Metode pendekatan yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini bahwa keabsahan permintaan ekstradisi yang dilakukan oleh Pemerintah Venezuela kepada Pemerintah Amerika Serikat terkait keterlibatan warga negara Amerika Serikat yang ditinjau dari asas- asas ekstradisi, melalui asas tidak mengekstradisikan warga negara dan asas tidak mengekstradisikan kejahatan politik, bahwasanya asas – asas tersebut sulit untuk dicapai dalam praktik ekstradisi. Perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan oleh Venezuela dengan Amerika Serikat, setelah peninjauannya berdasarkan Pedoman yang dikeluarkan Persatuan Bangsa – Bangsa, ialah *Model Treaty on Extradition*, memperlihatkan bahwa perjanjian ekstradisi antara Venezuela dengan Amerika Serikat belum mencakup semua hal – hal yang terdapat dalam pedoman tersebut dan dapat berdampak kepada efektifitas pemberlakuan perjanjian ekstradisi tersebut.

Kata Kunci : Ekstradisi, Venezuela-Amerika Serikat, *Model Treaty on Etradition*.

ABSTRACT

A nation in order to fulfill its necessities rely on its relations with the other states. One of the function for having a relation with other state is to protect the prominence of its national law. The development of technology having, not only the positive benefits, but also negative ones. One of the negatives is the development of criminality which getting harder for law to solve. One of the crimes is the transnational crime that often happened nowadays which unreachable by national law. Based on that consideration, bring forth the extradition practice into International Law, in order to cope with transnational crime. The problem that being discussed in this legal article concerning the legality on the extradition request by Venezuelan Government to United States related to United States nationals involvement on the raid inside Venezuelan territory.

On arranging this research, methods that being used is normative juridical, which is research processed by using secondary data that used library materials. This normative juridical approach method uses primary, secondary, and tertiary legal materials.

The result of this research implies that the legality of the request sent by Venezuelan Government to United States related to United States nationals involvement which reviewed by extradition principles, through non-extradition nationals principle and non-extradition political crime principle, the results are that principles are hard to achieve on extradition practice. Venezuelan International Extradition Treaty with United States , reviewed by the guidance that published by the United Nations, Model Treaty on Extradition, implies that the extradition treaty between Venezuela and United States doesn't embrace all the guidance on the Model treaty on Extradition, which may affect on the effectiveness of the enactment of the treaty.

Keywords : Extradition, Venezuela-United States, Model Treaty on Extradition.